

Kebijakan Pendidikan Dasar Perspektif Karakteristik Peserta Didik

Sukri Agustian

Program Magister MPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

sukriagustiano97@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan di sekolah dasar dengan menggunakan perspektif karakteristik peserta didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berjenis *library research*. Data yang akan dipaparkan pada hasil pembahasan didapatkan melalui studi kepustakaan yang merujuk kepada berbagai sumber ilmiah seperti buku-buku, artikel ilmiah dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah dasar merupakan wadah utama yang memiliki fungsi untuk mengembangkan dan menentukan karakter yang akan dimiliki oleh peserta didik.

Kata kunci: Kebijakan, pendidikan dasar, karakteristik peserta didik

Abstract: *This study aims to determine how the education policy in elementary schools by using the perspective of the characteristics of students. The method used in this research is a qualitative approach of library research. The data that will be presented in the results of the discussion are obtained through literature studies that refer to various scientific sources such as books, scientific articles and studies related to the title of the discussion. The results of the study indicate that elementary school is the main forum that has a function to develop and determine the character that will be possessed by students.*

Keyword: *policies, basic education, student characteristics*

PENDAHULUAN

Pendidikan dimasa lalu dan masa sekarang termasuk di era globalisasi, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki kemampuan dalam keilmuan dan keimanan. Tujuan pendidikan secara umum dalam arti luas adalah menghantarkan anak didik agar memiliki kemampuan menghadapi masa depannya dengan kemandirian dan kecerdasannya serta keagungan moralnya. Dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, bangsa Indonesia sangat memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang besar dan bermutu untuk mendukung terlaksananya program pembangunan dengan baik. Pendidikan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi anak. Kegiatan pembelajaran perlu menempatkan anak didik sebagai subyek belajar dan mendorong anak didik untuk mengembangkan segenap bakat dan potensinya secara optimal.

Dalam kebijakan nasional, ditegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa merupakan kebutuhan asasi dalam proses berbangsa dan bernegara. Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah bertekad untuk menjadikan pembangunan karakter bangsa sebagai

bahan penting dan tidak dipisahkan dari pembangunan nasional. Terkadang siswa dalam kegiatan pembelajaran melakukan ketiga gaya belajar tersebut, tetapi pada tahapan tertentu siswa akan cenderung pada salah satu atau kedua gaya belajar, sehingga dengan kata lain pengkategorian ini tidak berarti bahwa siswa hanya memiliki salah satu gaya belajar tertentu. Berkenaan dengan era globalisasi dan multikultural, maka peran guru bersama para administrator sekolah harus berkerjasama untuk meningkatkan kualitas siswanya baik dari sisi akademis maupun non akademis sehingga dapat dicapai hasil pembelajaran yang maksimal.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berjenis *library research*. Data yang akan dipaparkan pada hasil pembahasan didapatkan melalui studi kepustakaan yang merujuk kepada berbagai sumber ilmiah seperti buku-buku, artikel ilmiah dan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul pembahasan. Hasil yang didapatkan penulis disajikan langsung secara objektif melalui narasi deskriptif. Hal tersebut sesuai dengan teori penelitian kualitatif yang mengatakan bahwa hasil penelitian kualitatif yang dibutuhkan akan disajikan secara langsung dan objektif. (Elvanisi: 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Dasar

Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu diantara komponen dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Melaksanakan kebijakan berarti menjalan sebuah pilihan yang telah ditetapkan dari berbagai alternatif dalam perumusan perundangan yang telah berlaku, didukung oleh personil yang profesional, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Sanusi dalam Hasbullah berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan sebuah proses dalam menjalankan, menyelenggarakan dan mengupayakan alternatif yang telah diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku. (Hasbullah 2015)

Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan publik dibidang pendidikan. Kebijakan yang ada didalam sebuah pendidikan merupakan sebuah kunci utama bagi keunggulan, bahkan eksistensi bangsa dalam persaingan secara global. Salah satu argumen utamanya adalah globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi tentu saja akan memberikan hasil jika demokrasi didukung oleh nilai-nilai pendidikan. Olsen mengatakan "*Education policy in the twenty first century is the key to global security, sustainabilty and survival. Education policy are central to such global mission*".(Mark, John Codd and Anne-Marie 2001) Kebijakan pembangunan pendidikan dasar yang dikenal dengan program Wajib Belajar merupakan sebuah langkah strategik yang dilakukan dalam bentuk strategi rekayasa sosial dengan cara mengubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan tujuan akhir dari rekayasa pendidikan tersebut ialah terjadinya perubahan pola pikir, perilaku serta terbentuknya aspirasi pendidikan yang tinggi pada masyarakat.

Bennis, Benne dan Chin dalam penjelasannya yang berkaitan dengan rekayasa sosial yang diungkapkan oleh Suyanto bahwa terdapat tiga strategi untuk melakukan rekayasa sosial terkait dengan pendidikan yang diharapkan akan memberikan dampak secara signifikan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan suatu bangsa atau negara, yaitu:

1. **Power Coercive Strategies**, mengandalkan keberhasilannya melalui pendekatan hukum. Hal tersebut masih sangat sulit dilakukan penerapannya di Indonesia sebab belum memberikan sanksi secara tegas bagi mereka yang tidak melaksanakannya.
2. **Empirical-Coersive Strategies** melakukan kampanye gerakan wajib belajar dengan melalui temuan-temuan empirik serta bukti-bukti yang dapat diamati oleh masyarakat.
3. **Normative-Reductive Strategies** merupakan sebuah strategi yang paling cocok untuk digunakan. Strategi ini berasumsi bahwa pola perilaku masyarakat akan dapat dipelihara dan dipertahankan melalui komitmen sosiokultural yang ada didalamnya.

Rekayasa dan perubahan tentu saja akan terjadi jika individu yang ada didalam masyarakat didorong untuk melakukan perubahan pada sistem nilai, keyakinan, sikap dan pengetahuan mereka terhadap pendidikan. (DP 2011)

Secara sederhana tujuan pelaksanaan kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat terealisasi sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program telah dirancang dan dana telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia, hlm. 94 Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, yaitu:

1. Informasi

Dalam upaya menyatukan pemahaman, visi, misi dari kebijakan yang dirumuskan, maka sangat diperlukan adanya informasi. Keefektifan sebuah informasi akan mengalir jika sekelompok orang yang melakukan kerjasama dapat berkomunikasi secara terbuka. Informasi yang kurang mengakibatkan adanya gambaran yang tidak tepat terhadap objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan.

2. Isi kebijakan

Mengingat kebijakan publik seperti pendidikan merupakan sarana untuk mengatasi permasalahan didalam sebuah pendidikan, maka isi dari kebijakan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaannya. Isi kebijakan harus jelas dan tegas serta mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodir kepentingan seluruh *stakeholder*. Kegagalan pelaksanaan kebijakan biasanya terjadi karena ketidakjelasan dari isi ataupun tujuan kebijakan, ketidaktepatan, tidak tegasnya intern dan ekstern atau kebijakan itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan terdapat kekurangan yang berkaitan dengan sumberdaya pendukungnya.

3. Dukungan

Terdapat dua jenis dukungan yang dimaksud yaitu dukungan secara fisik maupun non fisik. Apabila didalam pelaksanaan sebuah kebijakan tidak mencukupi kedua dukungan tersebut maka pelaksanaannya akan sulit dilakukan. Jadi pada dasarnya kedua dukungan tersebut berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam proses pelaksanaan program.

4. Pembagian potensi

Pada dasarnya elemen pembagian potensi berkaitan dengan kinerja koordinasi masyarakat luas. Koordinasi dibutuhkan karena setiap pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik sentral sebagai titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan. (Hasbullah 2015)

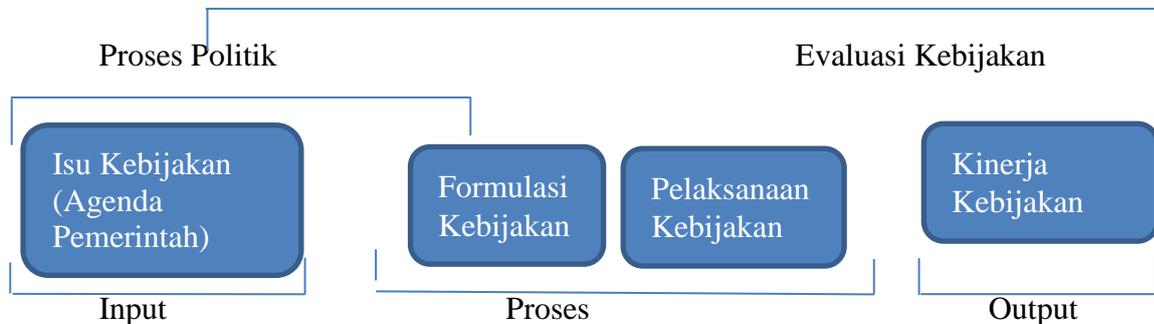
Pelaksanaan kebijakan didalam pendidikan merupakan sebuah proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat didalam program.

Menurut kerangka pikir Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MEN-PAN) No. PER/04/M-PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan meliputi:

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan (0-6 bulan), termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan pihak yang menjadi pelaksana kebijakan pendidikan, baik dari kalangan pemerintah atau birokrasi maupun masyarakat (publik). Tahapan sosialisasi dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media serta pertemuan langsung dengan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan pendidikan dilaksanakan tanpa sanksi (masa uji coba)
3. Pelaksanaan kebijakan pendidikan dengan sanksi dilakukan setelah masa uji coba selesai, disertai pengawasan dan pengendalian
4. Setelah dilakukan pelaksanaan kebijakan pendidikan selama tiga tahu, dilakukan evaluasi kebijakan pendidikan. Hasbullah, hlm. 100-101

Tilaae dan Riant berpendapat bahwa sebagai sebuah proses kebijakan saling mengembangkan dalam bentuk kontribusi “*value*” antar sub sistem. *Value* yang dikreasikan pada tahap perumusan menyumbangkan pada tahap pelaksanaan. *Value* yang dikreasikan pada tahap pelaksanaan menyumbangkan kepada tahap kinerja kebijakan. *Value* yang dikreasikan dilingkungan menyumbangkan kepada setiap tahap, baik perumusan, pelaksanaan, maupun kinerja. Pendekatan *Value creation* ini merupakan pendekatan manajemen dalam proses kebijakan publik. Keberhasilan pada masing-masing tahap akan mengontribusikan keberhasilan pada tahap selanjutnya. Demikian pula kegagalan pada masing-masing tahap

akan mengontribusi kegagalan pada tahap selanjutnya. Keberhasilan inilah yang disebut *value creation* yang merupakan modal penting bagi tahapan selanjutnya. Proses *Value Creation* ini sendiri dihasilkan dari dinamik internal dari masing-masing proses. (Nugroho 2008)



Gambar 1. Proses Kebijakan

Menurut beberapa ahli terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kebijakan dalam pendidikan, diantaranya:

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan yang bersifat *top-down* yang dikenal dalam teori-teori organisasi modern. Pandangan dalam pendekatan ini ialah bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, dilaksanakan, dikendalikan dan dievaluasi secara struktural. Dalam pendekatan ini menekankan pentingnya komando dan supervisi menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi. Titik lemah dari pendekatan ini adalah proses pelaksanaan kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien.

2. Pendekatan Prosedural dan Manajerial

Pendekatan ini pada dasarnya dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pendekatan struktural. Pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur-struktur birokrasi pelaksana yang cocok untuk implementasi program, namun untuk mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur manajerial dan teknik manajemen yang tepat.

3. Pendekatan Perilaku

Perilaku manusia merupakan dasar dari semua orientasi kegiatan pelaksanaan kebijakan. Perilaku manusia bahwa upaya pelaksanaan kebijakan yang baik, apabila manusia dan segala sikapnya menjadi hal untuk menjadi bahan pertimbangan dan dipengaruhi agar proses pelaksanaan kebijakan tersebut berlangsung dengan baik.

4. Pendekatan Publik

Pendekatan ini mengacu pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses pelaksanaan kebijakan. Dalam proses pelaksanaan kebijakan, dengan menggunakan pendekatan politik memungkinkan digunakannya paksaan dari sebuah kelompok dominan. Pendekatan politik berperan dalam mempertimbangkan

segala aspek–aspek dari perilaku. Apabila hal tersebut tidak memperhitungkan kemampuan kelompok penentang kebijakan untuk memblokir usaha-usaha dari para pendukung kebijakan yang dilaksanakan.

Pendidikan Dasar

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1990 disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan sembilan tahun, terdiri atas program pendidikan dasar enam tahun disekolah dasar (SD) dan program pendidikan tiga tahun disekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Maka dari itu sekolah dasar merupakan salah satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. (Bafadal 2003)

Berdasarkan kurikulum sekolah dasar tahun 1975 dalam Suryosubroto yang dimaksud dengan Sekolah Dasar adalah lembaga pendidikan yang menyelesaikan program pendidikan dasar untuk mempersiapkan siswanya yang dapat melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi agar menjadi warga negara yang baik. (Suryosubroto 2007) Secara acuan nasional Sekolah Dasar (SD) bertujuan:

1. Mendidik peserta didik agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan pancasila. Mampu membangun dirinya sendiri dan ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan individu dan pembangunan bangsa;
2. Memberikan bekal kemampuan yang diperlukan bagi peserta didik agar dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi;
3. Memberikan kemampuan dasar untuk hidup dimasyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan lingkungan. (Suryosubroto 2007)

Sedangkan menurut Subari tujuan pendidikan di Sekolah Dasar terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Tujuan Umum

Pendidikan sekolah dasar bertujuan agar lulusan memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keterampilan dan pengetahuan, sikap dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, bekerja keras dimasyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.

2. Tujuan Khusus

Yang menjadi tujuan pendidikan sekolah dasar meliputi bidang pengetahuan, bidang keterampilan dan bidang nilai maupun sikap.

Sekolah Dasar sangat berperan penting terhadap kemampuan peserta didik dalam mendapatkan pengetahuan secara umum, kemampuan komunikasi verbal dan numerika, sikap dan orientasi nilai dan kerja keras yang sistematis. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan memiliki kontribusi terhadap banyak aspek, seperti:

- a. Mendewasakan anak didik dalam memainkan peran sosialnya;
- b. Transformasi kebudayaan dan masyarakat;
- c. Menjamin integritas sosial;
- d. Sumber inovasi sosial;

e. Kejayaan bangsa dimasa depan.

Sedangkan pendapat Purnomo Setiadji Akbar dalam Buletin Suara Guru No. 2 Tahun XVIII Februari 1994 menyatakan bahwa terdapat beberapa manfaat pendidikan Sekolah Dasar sebagai berikut:

1. Pendidikan ditingkat Sekolah Dasar adalah pendidikan formal pertama tempat anak diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya (lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan yang lebih luas) sehingga akan terbentuk kepribadiannya, kapasitas intelektualnya dan kepekaan sosialnya.
2. Pendidikan Sekolah Dasar diharapkan dapat menyiapkan anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga pada jenjang inilah diharapkan anak-anak telah mempunyai bekal yang cukup untuk bisa melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya
3. Jika mereka tidak melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya, paling tidak mereka telah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mencari pekerjaan.

Perkembangan Peserta Didik

Perkembangan erat kaitannya dengan bagaimana seseorang tumbuh, bisa beradaptasi dengan lingkungan dan berubah secara fisik atau psikis sepanjang hidupnya. Pendidikan mempunyai peran penting dalam perkembangan seorang individu, dimana pendidikan mempunyai peran sebagai pembantu seseorang dalam menghadapi dan menjalankan tugas-tugas perkembangan. Suatu perkembangan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perkembangan anak berlangsung dengan sendirinya atas kekuatan yang berada dalam diri anak itu sendiri, sebab di dalam diri anak sudah ada potensi hanya tinggal menunggu waktu untuk berkembang
2. Perkembangan pada anak (peserta didik) tidak dapat dicampuri dengan mengubahnya. Usaha untuk mengubah dan mencampuri perkembangan itu biasanya malah menimbulkan bahaya dan akan membuat tidak berkembangnya potensi-potensi atau rusaknya hasil yang ingin dicapai
3. Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan suatu perpaduan kekuatan dari dalam diri anak sendiri yang mendorong untuk berkembang dan lingkungan yang mempengaruhi output (peserta didik yang dihasilkan).

Karakteristik Anak Usia Dasar (SD)

Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai pada usai 12 tahun. Mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak berarti anak usia sekolah berada dalam dua masa perkembangan yaitu masa kanak-kanak tengah (6-9 tahun) dan masa kanak-kanak akhir (10-12 tahun). Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang

mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran.

Menurut Havighurst, tugas perkembangan anak usai sekolah dasar meliputi:

1. Menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik
2. Membina hidup sehat
3. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok
4. Belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin
5. Belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat
6. Memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif
7. Mengembangkan kata hati, moral dan nilai-nilai
8. Mencapai kemandirian pribadi. (Desmita 2008)

Dalam upaya mencapai setiap tugas perkembangan tersebut, guru dituntut untuk memberikan bantuan berupa:

1. Menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik
2. Melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya sehingga kepribadiansosialnya berkembang
3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep
4. Melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. (Desmita 2008)

Bentuk-Bentuk Karakteristik Siswa SD

Ada empat macam bentuk-bentuk karakteristik siswa Sekolah Dasar, sebagai berikut: (Sumantri 2015)

1. Senang Bermain

Karakteristik ini menuntut guru Sekolah Dasar untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih-lebih untuk kelas rendah. Guru Sekolah Dasar Seyogiannya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan model pembelajaran yang serius tapi santai. Penyusunan jadwal pelajaran hendaknya diselang seling antara mata pelajaran serius seperti IPA, Matematika dengan pelajaran yang mengandung unsur permainan seperti pendidikan Jasmani atau Seni Budaya dan Keterampilan dan dapat dilakukan secara terpadu.

2. Senang bergerak

Orang dewasa dapat duduk berjam-jam sedangkan anak Sekolah Dasar dapat duduk dengan tenag paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang

model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapi atau jangka waktu yang lama, dirasakan anak sebagai siksaan.

3. Anak senang bekerja dalam kelompok

Dari pergaulan dengan kelompok sebaya, anak belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya di lingkungan, belajar setia kawan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat, mempelajari olahraga dan membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara kelompok.

4. Senang merasakan atau melakukan/memperagakan sesuatu secara langsung

Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak Sekolah Dasar memasuki tahap operasional konkret. dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasarkan pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, jenis kelamin, moral, dan lain-lain. Bagi anak Sekolah Dasar, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakan sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh anak akan lebih memahami tentang konsep IPA jika langsung dengan praktiknya.

Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengetahui kebenaran atau kebaikan, mencintainya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari (Suyadi 2013). Menurut D. Yahya Khan dalam bukunya Jamal Ma'mur Asmani mengemukakan bahwa pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat, dan bangsa serta membantu orang lain untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain, pendidikan karakter mengajarkan anak didik berpikir cerdas, mengaktivasi otak tengah secara alami (Asmani 2011). Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh guru untuk mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu dalam membentuk watak peserta didik dengan cara memberikan keteladanan, cara berbicara atau menyampaikan materi yang baik, toleransi, dan berbagai hal yang terkait lainnya. (Asmani 2011).

Fungsi Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama yaitu pengembangan, perbaikan dan penyaring. Fungsi pertama berperan untuk mengembangkan potensi siswa menjadi pribadi berperilaku baik; ini bagi siswa yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Fungsi perbaikan yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional

untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi siswa yang lebih bermartabat; dan fungsi penyaring untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. (Sulistiyowati 2012)

Tujuan Pendidikan Karakter

Ada beberapa tujuan pendidikan karakter diantaranya, yaitu:

1. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif siswa sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa
2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius
3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab siswa sebagai generasi penerus bangsa
4. Mengembangkan kemampuan siswa menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan
5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. (Sulistiyowati 2012)

Dasar Hukum Pendidikan Karakter

Berikut adalah dasar hukum pembinaan pendidikan karakter, yaitu:

1. UUD 1945
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
5. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
6. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
7. Rencana Pemerintah jangka Menengah Nasional 2010-2014
8. Renstra Kemendiknas Tahun 2010-2014
9. Resentra Direktorat Pembinaan SMP Tahun 2010-2014. (Asmani 2011)

Urgensi Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter diharapkan mampu membangkitkan kesadaran bangsa ini untuk membangun pondasi kebangsaan yang kokoh. Dengan pendidikan karakter diharapkan kecerdasan luar dan dalam menjadi bersatu dalam jiwa sebagai kekuatan dahsyat dalam menggapi cita-cita besar yang diimpikan bangsa, yakni sebagai bangsa yang maju dan bermartabat yang disegani karena integritas, kredibilitas, prestasi, dan karya besarnya dalam panggung peradaban manusia. (Asmani 2011)

Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter

2. Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku
3. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk membangun karakter
4. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian
5. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik
6. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan membantu mereka untuk sukses
7. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik
8. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagai tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama
9. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter
10. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menjadi pegangan kepala sekolah dalam melakukan monitoring kinerja staf-staf, perkembangan, dan dinamikanya. Sehingga, setiap problem bisa cepat dideteksi dan dicarikan solusinya secara praktis. (Asmani 2011)

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter

Nilai-nilai yang hendak diinternalisasikan terhadap anak didik melalui pendidikan karakter adalah: (Wibowo 2013)

1. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain
2. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain
3. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
5. Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat atau berkomunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta damai adalah sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Demikianlah kedelapan belas nilai karakter yang dicanangkan KEMENDIKNAS dalam upaya membangun karakter bangsa melalui pendidikan disekolah/madrasah. Meskipun 18 nilai karakter di atas mirip dengan 36 butir pancasila maupun P4, tetapi setidaknya ada kemasam itulah yang harus diinternalisasikan ke dalam semua mata pelajaran melalui strategi pembelejaraan aktif-menyenangkan. Dengan demikian, pembangun karakter bangsa buka hanya menjadi tanggung jawab mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) maupun Pendidikan Agama, melainkan semua mata pelajaran termasuk Matematika, IPA, IPS, Sains, Olahraga, Bahasa dan Sastra, dan sebagainya. (Sulistiyowati 2012)

Pendidikan karakter adalah inti dari suatu proses pendidikan. Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari karakter itu menghendaki suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan melalui berbagai mata pelajaran yang ada dalam kurikulum. Pendidikan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan karakter bangsa. Kebijakan yang menjadi atribut suatu karakter pada

dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu, pendidikan karakter pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. (Sulistiyowati 2012)

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan adalah sebuah kebijakan publik dibidang pendidikan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan, dan pembagian potensi. Pendidikan dasar merupakan pendidikan sembilan tahun, terdiri atas program pendidikan dasar enam tahun disekolah dasar (SD) dan program pendidikan tiga tahun disekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Maka dari itu sekolah dasar merupakan salah satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Ada tiga perkembangan peserta didik yang erat kaitannya dengan pembelajaran yaitu perkembangan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Ada empat macam bentuk-bentuk karakteristik siswa SD yaitu senang bermain, senang bergerak, anak senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan/memperagakan sesuatu secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmani, Jamal Ma'mur. 2011. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter Di Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Bafadal, Ibrahim. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Desmita. 2008. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- DP, Muchlis. 2011. "Kebijakan Pendidikan Dasar Di Provinsi Sulawesi Selatan." *Analisis Kebijakan Publik* 2 (1).
- Elvanisi, Ade. 2018. "Analisis Keterampilan Proses Sains Pada Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA* 2 (4): 145–52.
- Hasbullah, M. 2015. *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mark, John Codd and Anne-Marie, Olsen. 2001. *Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy*. London: Sage.
- Nugroho, H.A.R Tilaar & Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulistiyowati, Endah. 2012. *Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Citra Aji Prima.
- Sumantri, Mohammad Syarif. 2015. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryosubroto, B. 2007. *Manajemen Sekolah Dasar: Buku Pegangan Kuliah*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Suyadi. 2013. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. 2nd ed. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Karakter Berbasis Sastra, Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Melalui Pengajaran Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



SHANUN: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah

E-ISSN: 2963-1173

Volume 1 No. 1 September 2022

Available online at: <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JUS>
